

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 106, 03%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2012,2013 dan2016 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 93,04% ,85,70% dan 92,58%. Untuk tahun 2014, 2015, dan 2017 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 127,75%, 117.03%, dan 120,08%.

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2012-2017 tergolong efisien karena rata - rata rasionya di bawah 100% yaitu 89,99%. Total pendapatan melebihi total belanja daerah. Rinciannya secara berurutan adalah 91,72; 91,26,88,24,89,17,88,14 dan 91,37. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya artinya bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi BPKAD Kabupaten Timor Tengah adalah 85,05% . Pada tahun 2012 88,52%,

Pada tahun 2013 rasionya menurun menjadi 86,12%, kemudian pada tahun 2014 Menurun lagi menjadi 79,63% dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 82,09%, dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2016 menjadi 85,24% dan 2017 meningkat menjadi 88,61%. Sedangkan belanja modal memiliki rata-rata 16,25% hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 masih memiliki nilai dibawah rata-rata dengan jumlah 14,90%, 2015 dengan nilai 14,53%, 2016 dengan nilai 10,02% dan di tahun 2017 sebesar 20,91% dan nilai yang berada di atas rata-rata yaitu 2012 dan 2014 dengan nilai 28,07% dan 17,09%.

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD memiliki rata-rata sebesar 40% berikut masih ada kriteria yang dibawah rata-rata yaitu tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 dengan nilai 26%, 14%, 34%, dan 19% dan yang berada di atas rata-rata yaitu tahun 2017 dengan nilai 105%. Dan pendapatan daerah dengan rata-rata 15% dan yang berada di bawah rata-rata adalah tahun 2014 (9%), dan 2017 (13%) sedangkan yang berada di atas rata-rata yaitu tahun 2013 (17%), 2015 (18%) dan tahun 2016 dengan nilai (19%).

5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kemampuan keuangan BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan fluktatif dimana peranan pemerintah daerah lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah pusat (daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah). Rata rata rasio ini adalah 18, 69 % dengan rincian Nilai terendah terjadi pada tahun 2012 dimana nilainya sebesar 6,38% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 29,48%. Tahun tahun lainnya yaitu tahun 2013,

2015,2016 dan 2017 masing-masing sebesar : 13,77%, 19,84%, 16,08 dan 26,61%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak tidak lagi ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) rendah. Adapun rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 16,25%. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 28,07%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 14,90%, dan mengalami peningkatan menjadi 17,09% pada tahun 2014. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 14,53%, dan menurun lagi pada tahun 2016 terjadi 10,2% dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 12,91%..

5.2 Implikasi Teoritis

Dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dibutuhkan dalam menganalisis rasio-rasio keuangan daerah untuk menentukan kriteria keefektifitasan pendapatan maupun pengeluaran. Berikut akan dirincikan sebagai berikut :

Pada rasio Efektifitas PAD kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki rata-rata sebesar 39,2% pada kriterianya tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 masih di bawah rata-rata,dan yang berada di atas rata-rata hanya tahun 2017 dengan nilai 103%. Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya meningkatkan realisasi PAD sehingga kedepannya semakin tinggi Efektifitas PAD maka semakin baik kinerja pemerinta daerah . dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan untuk tidak terlalu terpaku dengan target yang mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah sehingga bisa melampaui target yang telah di tentukan sebelumnya .

Rasio Efisiensi keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah tergolong efisien karena rata-rata rasionya 89,99% tetapi masih ada 2014, 2015, dan 2016 yang masih berada di bawah rata-rata sehingga Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya mempertahankan keefisien tersebut sehingga pada tahun yang berikutnya boleh di atas rata-rata dari tahun ke tahun. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatnya sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Rasio keserasian memiliki rata-rata dalam belanja operasi sebesar 85,03% dana belanja modal sebesar 16,25%, hal ini menunjukkan bahwa sebagian dana yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Selatan masih di prioritaskan untuk belanja operasinya sehingga belanja modal relatif kecil, ini dapat dibuktikan bahwa belanja operasi masih relatif besar dibandingkan dengan rata-rata belanja modal. Untuk kedepannya pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan lebih memperhatikan kepada masyarakat yang nantinya akan dinikmati oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan oleh kepentingan publik.

Rasio pertumbuhan, dalam Pendapatan Asli Daerah memiliki rasio rata-rata sebesar 40% dan Pendapatan Daerah sebesar 15% jika dilihat dari rasio pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah bisa dikatakan baik, terutama pertumbuhan rasio Pendapatan Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan yang selalu mengalami kenaikan meskipun pada kenyataannya proporsi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Apabila pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berani mengurangi PAD untuk

dialokasikan ke belanja modal maka pemerintah mengutamakan pembangunan daerahnya.

Rasio kemandirian Keuangan Daerah memiliki rata-rata sebesar 18,69%, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak luar selalu mengalami kenaikan. Pada rata-rata kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif karena pembiayaan pemerintah dan pembangunan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan sehingga tidak telalu tergantung pada pemerintah pusat.

5.3. Implikasi Tarapan.

Dari hasil analisis pada Bab sebelumnya penulis ingin memberikan saran bagi pihak – pihak yang berperan penting dalam pengelolaan dan analisis bidang keuangan khususnya Laporan Keuangan Daerah tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut:

5.3.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain: di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam

peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

5.3.2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 6 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 Kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.